

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui kegiatan perekonomian di Indonesia sangatlah rentan terhadap perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik intern maupun ekstern, walaupun demikian roda perekonomian terus berkembang selama masyarakat terus melakukan transaksi dalam berbagai bidang pembangunan. Pembangunan negara pun ditunjang oleh kegiatan perekonomian. Pembangunan dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, hal itu menandakan bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan merata ke seluruh penjuru tanah air sehingga akan tercapainya masyarakat adil dan makmur tanpa adanya kesenjangan sosial.

Setiap organisasi bisnis maupun instansi pemerintahan dalam menjalankan aktivitasnya membutuhkan dana yang digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional maupun non operasional. Kompleksnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, menjadikan dana sebagai unsur utama dalam pemenuhan kebutuhan organisasi bisnis maupun instansi pemerintahan

Pemenuhan kebutuhan dana tidaklah terlepas dari suatu proses yang harus dilaksanakan hingga dana yang dibutuhkan tersebut dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Sehingga dana tersebut dapat digunakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggungjawab.

Pada instansi pemerintahan atau satuan kerja, penggunaan anggaran merupakan unsur yang sangat penting, agar pengelolaan keuangan dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Anggaran yang digunakan telah ditetapkan oleh pemerintah yang tersaji dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. Dalam pelaksanaannya setiap satuan kerja harus merinci setiap aktivitas yang mengakibatkan terjadinya pencairan dana atas beban APBN yang disajikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Kantor Kementerian Pekerjaan Umum BBPJM IV SNVT Wilayah I provinsi Banten Bagian Pelaksanaan Tangerang-Serang-Merak sebagai salah satu instansi pemerintahan dalam membelanjakan kebutuhannya menggunakan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk mendapatkan dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional IV SNVT Wilayah I provinsi Banten Pelaksanaan Tangerang-Serang-Merak perlu mencairkan dana sesuai dengan ketentuan dan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah lah yang memberikan wewenang kepada masing-masing instansi dalam proses pencairan dana

anggaran melalui lembaga yang ditunjuk/diberikan wewenang. Lembaga yang diberikan wewenang tersebut adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), melalui lembaga inilah anggaran yang diperlukan dapat dicairkan melalui prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran gaji adalah kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Gaji bagi seorang pegawai adalah sangat penting sebagai balas jasa dari pemerintah atas berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pegawai tersebut setelah melakukan kewajibannya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Gaji adalah hak bagi para pegawai setelah dia melaksanakan kewajibannya. Bagi instansi pemerintah kegiatan pembayaran gaji ini bersifat rutin setiap bulan, bahkan dalam satu bulan suatu instansi dapat melakukan pembayaran gaji lebih dari satu kali. Dikarenakan pembayaran gaji menyangkut hajat hidup orang banyak maka diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam pembayaran gaji ke pegawai bersangkutan.

Setiap Pegawai Negeri sipil khususnya PNS Pusat dalam artian pembayaran gajinya membebani dana APBN pastilah instansi di tempat PNS tersebut bekerja memintakan gajinya lewat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Proses permintaan gaji ini diawali dengan pembuatan daftar gaji oleh Pembuat Daftar Gaji (PDG) instansi tersebut, kemudian diajukan ke Bendaharawan untuk dibuatkan SPM Gaji, lalu Bendaharawan membawa SPM Gaji beserta daftar gaji ke KPPN. Di KPPN

daftar gaji dan SPM Gaji akan diuji perhitungannya, jika telah benar maka KPPN akan menerbitkan SP2D Gaji tersebut.

Uraian di atas menjelaskan bahwa prosedur dalam pencairan anggaran merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam setiap instansi pemerintahan guna pemenuhan kebutuhan instansi tersebut.

Oleh karena itu, kerja praktek ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran gaji Pada Kantor Kementrian Pekerjaan Umum BBPJJ IV SNVT Wilayah I provinsi Banten Bagian Pelaksanaan Tangerang-Serang-Merak. Laporan ini menyajikan hasil pengamatan dan pengalaman yang didapat selama melakukan kerja praktek di Kantor Kantor Kementrian Pekerjaan Umum BBPJJ IV SNVT Wilayah I provinsi Banten Bagian Pelaksanaan Tangerang-Serang-Merak

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk melaporkan hasil kerja praktek dengan memilih judul **“Prosedur Pembayaran Gaji Pada Kantor Kementrian Pekerjaan Umum BBPJJ IV SNVT Wilayah I provinsi Banten Bagian Pelaksanaan Tangerang-Serang-Merak.**

2.1 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari kerja praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran gaji Pada Kantor Kementrian Pekerjaan Umum BBPJN IV SNVT Wilayah I provinsi Banten Bagian Pelaksanaan Tangerang-Serang-Merak
2. Untuk Mengetahui masalah yang timbul dalam pembayaran gaji Pada Kantor Kementrian Pekerjaan Umum BBPJN IV SNVT Wilayah I provinsi Banten Bagian Pelaksanaan Tangerang-Serang-Merak
3. Untuk mengetahui cara mengatasi masalah pembayaran gaji Pada Kantor Kementrian Pekerjaan Umum BBPJN IV SNVT Wilayah I provinsi Banten Bagian Pelaksanaan Tangerang-Serang-Merak

3.1 Kegunaan Kerja Praktek

1. Bagi penulis
 - a. Kerja praktek ini membantu dalam proses adaptasi yang diperlukan Terhadap lingkungan kerja

- b. Mengetahui prosedur pembayaran gaji pada Kantor Kementrian Pekerjaan Umum BBPJJN IV SNVT Wilayah I provinsi Banten Bagian Pelaksanaan Tangerang-Serang-Merak
 - c. Meningkatkan kompetensi penulis karena kerja praktek ini memberikan pengalaman teknis mengenai prosedur pembayaran gaji pada Kantor Kementrian Pekerjaan Umum BBPJJN IV SNVT Wilayah I provinsi Banten Bagian Pelaksanaan Tangerang-Serang-Merak
2. Bagi Kantor Kementrian Pekerjaan Umum BBPJJN IV SNVT Wilayah I provinsi Banten Bagian Pelaksanaan Tangerang-Serang-Merak

Diharapkan dapat membantu pelaksanaan pekerjaan teknis yang berhubungan dengan prosedur pembayaran gaji Kantor Kementrian Pekerjaan Umum BBPJJN IV SNVT Wilayah I provinsi banten Bandung yang telah memiliki standar dalam proses pelaksanaan pembayaran gaji berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan referensi mengenai prosedur pembayaran gaji bagi para peneliti di bidang keuangan dan rekan-rekan mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktek.

4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Kerja Praktek dilaksanakan di Kantor Kementrian Pekerjaan Umum BBPJJN IV SNVT Wilayah I provinsi Banten Bagian Pelaksanaan Tangerang-Serang-Merak di Komp. Taman Widya Asri Blok B2 No.26 Kota Serang Banten.. Penulis melaksanakan kerja praktek selama kurang lebih 1 bulan, terhitung dari tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 14 Agustus 2013

Adapun waktu pelaksanaan jam kerja praktek adalah :

1. Melaksanakan kerja praktek dari hari senin s/d jum'at
2. Masuk kerja praktek pada pukul 08.00 WIB s.d. pukul 14.00 WIB

Gambar 1.1
Jadwal pelaksanaan kerja praktek

no	Uraian	juli				Agustus				Sept				Okt				Nov				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Lokasi Kerja Praktek																								
2	Pelaksanaan kerja praktek																								
3	Pengumpulan Data																								
4	Penyusunan Data																								
5	Bimbingan Kerja Praktek																								
6	Sidang Kerja Praktek																								